



RAPERDA RAPBD Pendapatan Ditarget Rp 1,123 Triliun



SERAHKAN DRAFT: Pj Bupati Ismail menyerahkan draf RAPBD TA 2025 kepada Pimpinan DPRD Mempawah.

DPRD menggelar rapat paripurna penyampaian pidato Pj Bupati Mempawah mengenai Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Safruddin Asra, Senin (28/10) di Gedung DPRD Mempawah.

Dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Mempawah, Ismail menjabarkan RAPBD TA 2025 dengan pendapatan sebesar Rp 1,123 triliun yang bersumber dari PAD Rp 158,75 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp 99,13 miliar, retribusi daerah 11,40 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 6,25 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 41,96 miliar.

Pendapatan Ditarget Rp 1,123 Triliun

Sambungan dari halaman 1

"Anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 947,96 miliar terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp 901,64 miliar, transfer antar daerah Rp 46,32 miliar. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 16,92 miliar," paparnya.

Sektor belanja, lanjut Ismail, diproyeksikan sebesar Rp 1,203 triliun yang terdiri atas belanja operasi Rp 898,50 miliar, belanja modal Rp 167,90 miliar, belanja tidak terduga Rp 3 miliar dan belanja transfer Rp 134,03 miliar.

"Untuk belanja operasi sebesar 898,50 miliar digunakan untuk belanja pegawai Rp 514,64 miliar, barang dan jasa Rp 357,97 miliar, hibah Rp 23,27 miliar dan bansos Rp 2,65 miliar," bebernya.

Lalu, masih disampaikan Ismail, belanja modal akan dialokasikan untuk belanja peralatan dan mesin Rp 24,19 miliar, gedung dan bangunan Rp 86,82 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp 53,38 miliar, aset tetap Rp 3,30 miliar dan aset lainnya Rp 209,5 juta," urainya.

Masih dalam kesempatan

itu, Ismail juga memaparkan penggunaan belanja tidak terduga sebesar Rp 3 miliar untuk keadaan darurat termasuk kepentingan mendesak dan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

"Pada RAPBD TA 2025 ini terdapat defisit Rp 79,80 miliar yang berasal dari selisih pendapatan dikurangi belanja, serta SILPA sebesar Rp 79,80 miliar," rincinya.

Dalam kesempatan itu pula, Ismail menyampaikan informasi yang diperolehnya dari portal Kementerian Keuangan RI berkenaan dengan persetujuan perhitungan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk provinsi dan kabupaten kota di Kalbar.

"Untuk Kabupaten Mempawah, DBH Rp 24,54 miliar, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp 491,66 miliar, DAU yang ditentukan penggunaannya Rp 127,62 miliar, DAK fisik Rp 50,88 miliar, DAK Non Fisik Rp 135,58 miliar dan dana desa Rp 61,54 miliar. Sehingga total transfer pemerintah pusat Rp 891,84 miliar," paparnya.

Ismail memastikan proses

perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Mempawah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan diantaranya kegiatan Musrenbang desa, kelurahan dan kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten dan provinsi.

"Penetapan RKPD menjadi salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RKA-SKPD, dilanjutkan dengan penyusunan RAPBD yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama," katanya.

"Saya mengharapkan dukungan, saran dan masukan dari Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ini, disertai harapan kiranya dapat dibahas dan disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang pungkasnya. (wah)